

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP KONSEP PEMERINTAHAN
ISLAM MENURUT PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:
HENGKY
NPM: 1421020178

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP KONSEP PEMERINTAHAN
ISLAM MENURUT PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag.
Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., MH

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Hasan al-Banna sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin mengemukakan konsep pemerintahan untuk mengharmonikan antara agama dan negara. Konsep pemerintahan yang terdapat dalam teori Hasan al-Banna ini banyak mencontoh bentuk dan hakikat kepemimpinan Rasulullah Saw sebagai seorang Rasul dan khalifah yang agung di muka bumi ini. Sikap kepemimpinan Rasulullah menjadi titik tolak kecenderungan Hasan al-Banna dalam melahirkan pemikirannya mengenai konsep pemerintahan. Konsep pemikiran Hasan al-Banna ini sangat penting dalam menyelesaikan kemelut masyarakat bagi yang mencari suatu bentuk pemerintahan yang ideal.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana konsep pemerintahan Islam menurut pemikiran Hasan al-Banna dan bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap konsep pemerintahan Islam menurut pemikiran Hasan al-Banna.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif-analisis*. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yaitu al-Qur'an, buku karya Hasan al-Banna berjudul Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin jilid satu dan dua serta buku-buku *fiqh siyasah*, dan sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber yang tidak diperoleh secara langsung, mencakup dokumen-dokumen dan bahan hukum sekunder diperoleh dari referensi, buku-buku, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, Hasan al-Banna memilih sistem pemerintahan parlementer, dikarenakan apa yang diserahkan kepada sang Imam untuk menjalankan kekuasaan eksekutif tidak akan mampu dilaksanakan, kecuali mewakili kepada menteri yang membantunya. Mengenai cara menghargai aspirasi rakyat, menurut Hasan al-Banna cukup dengan membentuk *ahlul halli wal 'aqdi* sebagai lembaga perwakilan. *Kedua* analisis *Fiqh Siyasah* terhadap konsep pemerintahan Islam menurut pemikiran Hasan al-Banna yaitu, bahwa konsep pemerintahan Hasan al-Banna tampak sesuai dengan konsep pemerintahan dalam *fiqh siyasah*, dimana Hasan al-Banna menghendaki konsep *ahlul halli wal 'aqdi* sebagai lembaga perwakilan untuk menghargai aspirasi rakyat dan sistem parlementer juga tampak sesuai dengan konsep *wizarah* sebagai lembaga yang tugasnya membantu Imam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP
KONSEP PEMERINTAHAN ISLAM
MENURUT PEMIKIRAN HASAN AL-
BANNA**
Nama : HENGKY
NPM : 1421020178
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag. Agustina Nurhayati, S. Ag. M. H.

NIP. 197112282000031002

NIP. 197408162003122004

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah**

Frenki, M. Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721703260

PENGESAHAN

Skripsi: **ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP KONSEP PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA**, disusun oleh **HENGKY**, NPM: **1421020178**, Jurusan: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Kamis, 5 Maret 2020**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Sekretaris : Muhammad Jayus, M.HI.

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji III : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. H. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشَدُّ بِهِيَ أَمْرًا ﴿٣١﴾
وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾

Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku (yaitu) Harun,
saudaraku teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia
sekutu dalam urusanku. (Q.S. Thaha (20) : 29-32).¹

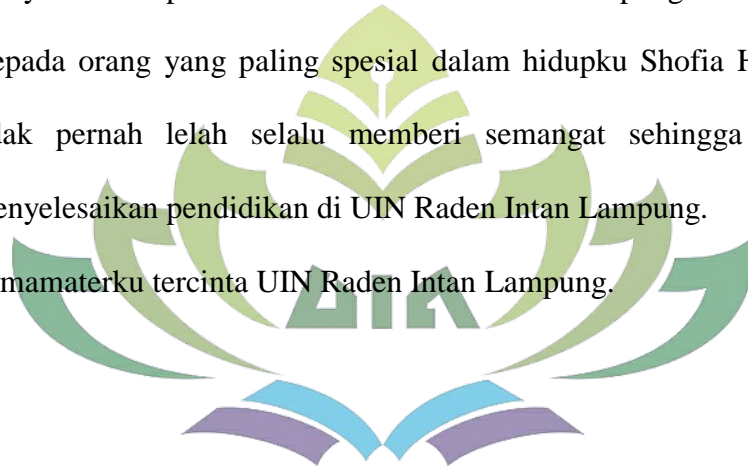


¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009), h. 470.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Dariyanto dan Ibundaku Sulastri, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis, dengan penuh kasih dan sayang, serta adik-adikku Handy, Willy, dan Annisa Adelia yang selalu memberikan support sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kepada orang yang paling spesial dalam hidupku Shofia Handayani yang tidak pernah lelah selalu memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Hengky, dilahirkan di Batam pada tanggal 19 Desember 1995, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Dariyanto dan Sulastri.

Pendidikan penulis di mulai dari tingkat MI Diniyyah Putri lulus pada tahun 2008, melanjutkan ke SMPN 26 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke SMA Perintis 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara) sampai sekarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Konsep Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Hasan Al-Banna”

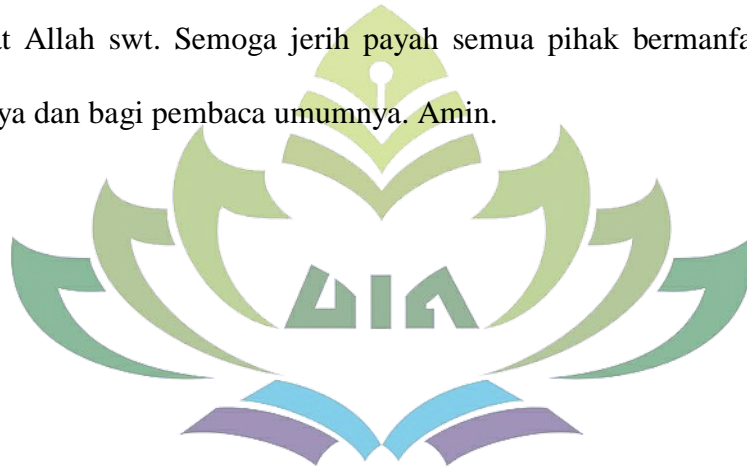
Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Program Studi Siyasah.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag selaku pembimbing I, dan Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., MH. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.

6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Angkatan 2014
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terima kasih penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.



Bandar Lampung, 5 Maret 2020

Hengky
NPM. 1421020178

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Signifikansi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	8
BAB II KONSEP PEMERINTAHAN	
A. Kajian Teori	11
1. Konsep Pemerintahan Secara Umum	11
a. Bentuk-bentuk Pemerintahan.....	11
b. Sistem Pemerintahan.....	13
2. Konsep Pemerintahan Menurut <i>Fiqh Siyasah</i>	25
B. Tinjauan Pustaka.....	45
BAB III KONSEP PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA	
A. Biografi Hasan Al-Banna	49
1. Sejarah Kelahiran.....	49
2. Pendidikan.....	51
3. Karya-karya Hasan al-Banna	55
B. Aktivitas Politik Hasan al-Banna.....	56
C. Konsep Pemerintahan Islam menurut Pemikiran Hasan al-Banna	62

BAB IV	ANALISI DATA	
	A. Konsep Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Hasan al-Banna.....	74
	B. Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Konsep Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Hasan al-Banna.....	79
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	83
	B. Rekomendasi.....	84
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalah-pahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi “**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KONSEP PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA**” yaitu sebagai berikut:

1. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹
2. *Fiqh* adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.²
3. Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah

¹ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis* (Bandung: Yrama Widya, 2001), h. 10

² Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), h.

adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³

4. Pemerintahan Islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam.⁴
5. Hasan al-Banna adalah tokoh mujahid dakwah dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1906 di desa Mahmudiyah kawasan Buhairah, Mesir. Pada usia 12 tahun, Hasan al-Banna telah menghafal al-Qur'an. Ia adalah seorang mujahid dakwah.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan menarik untuk dipahami, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah :

1. Secara Obyektif

Pemikiran politik maupun pemerintahan Hasan al-Banna, baik dalam konteks sejarah politik Islam maupun dalam penerapan konsep bernegara dalam Islam, ternyata sangat berpengaruh dalam membangun pemerintahan yang ideal di era modern ini terutama melalui gerakannya bersama Ikhwanul Muslimin. Oleh sebab itu Hasan al-Banna masih menjadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dunia Islam karena pemikiran-pemikirannya yang sangat brilian.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 3

⁴ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqh Politik Hasan al-Banna*, Terjemahan, Odie al-Faeda (Solo: Media Insani, 2003, h. 39

⁵ *Ibid.* h. 5.

2. Secara Subyektif

- a. Pembahasan ini cukup relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah, Jurusan Siyasah.
- b. Tersedianya bahan atau data dan bahan-bahan yang mendukung sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikannya.

C. Latar Belakang

Sejalan dengan berkembangnya dan meluasnya Islam di dunia, sudah barang tentu perkembangan itu tidak terlepas dari berbagai problematika yang timbul, baik yang timbul dari dalam Islam itu sendiri maupun dari luar Islam. Di antara problematika yang timbul dari dalam diri Islam itu sendiri adalah timbulnya *firqah*, kelompok atau golongan yang benihnya sudah mulai dirasakan tatkala nabi Muhammad saw sudah meninggal. Di antara kelompok yang muncul dewasa ini yaitu Ikhwanul Muslimin.

Ikhwanul Muslimin (IM) memproklamirkan diri sebagai gerakan politik pada tahun 1939, yaitu pada Mukhtamar ke-5 Ikhwanul Muslimin, bertepatan dengan peringatan 10 tahun kelahirannya. Ada dua alasan pokok yang berkaitan politik yang merupakan tujuan umumnya, yaitu; pertama membebaskan negara Islam dari penguasa asing. Kedua, mendirikan negara Islam yang bebas melaksanakan hukum Islam, menerapkan sistem sosial masyarakat dan menyampaikan prinsip dan dakwahnya kepada seluruh manusia.⁶

⁶ Syaikh Mushthafa Mansyur, *Fiqh Dakwah Jilid 1* (Jakarta: Al-I'tishom, 2000), h. 222.

Pandangan al-Banna terhadap konsepsi politik adalah, ketika berbicara mengenai hubungan antara Islam dan politik dan sikap seorang mukmin terhadapnya. Mengutip pernyataan al-Banna mengenai pendapatnya tentang politik, ”Tidak seorang pun berbicara kepada anda tentang politik dan Islam kecuali anda dapati bahwa ada pemisahan antara keduanya sejauh-jauhnya, mereka memberi pemahaman kepada kaum muslimin bahwa Islam adalah sesuatu, sedangkan masyarakat adalah sesuatu yang lain, Islam adalah sesuatu sedangkan kebudayaan adalah sesuatu yang lain, dan Islam harus berada jauh dari politik”, Katakanlah kepadaku, wahai saudaraku semua, jika Islam adalah sesuatu yang bukan politik, bukan sosial, bukan ekonomi, bukan pula budaya, lalu apa? apakah ia adalah beberapa bilangan rakaat yang sepi dari kehadiran hati ini? atautkah ia adalah beberapa ungkapan seperti yang pernah dikatakan oleh Rabi’ah al-‘Adawiyah, *istighfar* yang membutuhkan *istighfar*? Hanya untuk inilah, wahai saudaraku?, al-Qur’an diturunkan sebagai sistem yang pasti, terperinci dan sempurna?..⁷

Kesuksesan dakwah Rasulullah pun merupakan suatu implementasi dari strategi politik yang beliau rancang, bisa kita lihat mulai dari hijrah ke Madinah hingga puncaknya adalah Fathu Makkah (penguasaan Mekah). Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat bukannya mencoba lari dari intimidasi rezim kafir Quraisy, namun justru sebaliknya Rasulullah dan para sahabat melakukan konsolidasi politik yakni mulai dari membangun kekuatan politik internal hingga mengadakan koalisi politik dengan kaum Yahudi dan

⁷ *Ibid.* h. 66.

Nasrani melalui nota perjanjian Piagam Madinah. Beliau berpendapat bahwa, Politik adalah hal yang memikirkan tentang persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat.⁸ Politik sisi internal adalah mengatur roda pemerintahan, menjalankan tugas-tugasnya, merinci hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, melakukan pengawasan terhadap penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritik serta diluruskan jika kemudian mereka menyimpang.⁹

Sisi eksternal politik adalah 'menjaga kebebasan dan kemerdekaan bangsa, menanamkan rasa kepercayaan diri, kewibawaan, dan meniti jalan menuju sasaran-sasaran yang mulia, yang dengan cara itu bangsa akan memelihara harga diri dan kedudukan tinggi di kalangan bangsa-bangsa lain, serta membebaskan dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya dengan menetapkan pola interaksi bilateral maupun multilateral yang menjamin hak-haknya serta mengarahkan semua negara menuju perdamaian internasional yang peraturan ini bisa mereka sebut Hukum Internasional.¹⁰

Hasan al-Banna mengaitkan aqidah dengan aktivitas politik, 'Ia berkata sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika dia menjadi seorang politikus, yang mempunyai pandangan jauh ke depan dan memberikan perhatian yang penuh terhadap persoalan bangsanya. Keislaman seseorang menuntunnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsanya. Selanjutnya Hasan al-Banna mengatakan "Sesungguhnya

⁸ Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimins* (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 72.

⁹ *Ibid.* h. 68

¹⁰ *Ibid.* h. 69

kami adalah politikus dalam arti kami memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsa kami, dan kami bekerja dalam rangka mewujudkan kebebasan seutuhnya”.¹¹

Karenanya, menurut Ikhwan, politik adalah upaya memikirkan persoalan internal dan eksternal umat, memberikan perhatian kepadanya, dan bekerja demi kebaikan seluruhnya. Ia berkaitan dengan aqidah dan akhlak serta bertujuan untuk melakukan perubahan. Definisi ini sesuai dengan kondisi Mesir, khususnya pada masa-masa pendudukan asing. Karena memberikan motivasi internal kepada individu untuk melakukan aktivitas politik dalam permikiran, perhatian dan usaha dalam mengubah kondisi umat serta menjadikan politik sebagai masalah yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Gagasan Hasan al-Banna tentang Islam dan politik berbeda dari tokoh politik sebelumnya, Hasan al-Banna membuat terobosan baru, yaitu dengan menjadikan isu ekonomi dan isu sosial sebagai bagian dari program pergerakan Ikhwanul Muslimin. Isu itu menjadi bagian dari pembicaraan publik Mesir terutama ketika pengaruh sosialisme semakin besar. Hasan al-Banna menyesuaikan isi negara Islam dengan sistem politik yang ada di Mesir, ia menghindari konfrontasi dengan negara dan cenderung menyatakan pandangan secara umum, serta enggan menyebutkan visi negara.¹²

Hasan al-banna merupakan tokoh pembaharuan yang membawa perubahan bagi bangsa serta menghindarkan masyarakat dari arus sekularisasi, tokoh ini terbilang paling sukses melakukan institusionalisasi, ideologisasi dan

¹¹ Musthafa Muhammad Thahan, *Pemikiran Muderat Hasan Al-Banna*, h. 24.

¹² *Ibid.* h. 25.

organisasi dari pemikiran dari pemikiran fundamentalisme modern, setelah runtuhnya khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mendalami masalah ini dalam sebuah skripsi berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Hasan Al-Banna”

D. Fokus Penelitian

Kajian mengenai konsep pemerintahan ini luas sekali dan hampir semua ahli Hukum Tata Negara membahasnya dari era klasik hingga era kontemporer ini, maka penulis pembahasannya dibatasi :

1. Konsep pemerintahan Islam menurut pemikiran Hasan al-Banna.
2. Analisis *fiqh siyasah* terhadap konsep pemerintahan Islam menurut pemikiran Hasan al-Banna.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakonsep pemerintahan Islam menurut pemikiran Hasan al-Banna?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap konsep pemerintahan Islam menurut pemikiran Hasan al-Banna?

F. Tujuan Penelitian

Penyusunan karya ilmiah sesuai judul di atas bertujuan :

1. Untuk mengetahui konsep pemerintahan Islam menurut pemikiran Hasan al-Banna?
2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyasah* terhadap konsep pemerintahan Islam menurut pemikiran Hasan al-Banna.

¹³ Farid Numan, *Ikhwanul Muslimin Anugrah Allah yang Terzhalimi* (Depok: Pustaka Nauka, 2004), h, 130.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara Akademis, karya ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam di masa yang akan datang. Khususnya masalah yang berkaitan dengan Konsep Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Hasan al-Banna.
2. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai wacana dan referensi, sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi warga negara Indonesia untuk memperbaiki kondisi negara Indonesia yang sedang terus membangun dalam berbagai seginya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut. Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang fokusnya pada penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, dan menelaah dari sebagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif-analisis*, penelitian ini

¹⁴ Ranny Kautun, *Metode Penelitian Penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h, 38

dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁵

2. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka). Sedangkan sumber data adalah “subjek dari mana data dapat diperoleh”.¹⁶ Sumber-sumber datanya adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Buku primer, Al-Qur'an, buku karya Hasan al-Banna berjudul Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin jilid satu, dua, dan buku Hasan al-Banna berjudul Konsep Pembaruan Masyarakat Islam, serta buku-buku *fiqih siyasah*.
- b. Bahan Buku sekunder, yaitu buku-buku Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara, Kamus Bahasa Indonesia, Arab, Inggris, Majalah, ensiklopedia serta literatur lain yang berkaitan,

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku yang berkaitan yang berkaitan dengan pembahasan untuk dikaji secara mendalam. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi, sedangkan data yang diperlukan adalah data sekunder dengan menelusuri sumber-sumber bacaan untuk mendapatkan bahan data primer dan bahan data sekunder.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 114.

4. Pengolahan Data

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan Data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data, baik itu sumber dari al-Qur'an dan Hadits, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekonstruksi Data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.¹⁷

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah *content analisis*, dengan metode berfikir induktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus.¹⁸

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), h. 42.

BAB II

KONSEP PEMERINTAHAN

A. Kajian Teori

1. Konsep Pemerintahan Secara Umum

a. Bentuk-bentuk Pemerintahan

1) Monarki

Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam praktiknya, monarki memiliki dua jenis: *monarki absolut* dan *monarki konstitusional*. Di antaranya sebagai berikut:¹

a) Monarki Absolut

Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah Arab Saudi, Brunai Darussalam, Swazilan, Bhutan, dan lain-lain.

b) Monarki Konstitusional

Adapun, monarki konsitusional adalah pemerintahan yang kekuasaan kepala pemerintahannya (perdana menteri) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktik monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktikkan di beberapa negara, seperti, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Inggris.

¹ A. Ubaidillah, *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 127

Dalam model monarki konstitusional ini, kedudukan raja hanya sebatas simbol negara.

2) Oligarki

Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Contohnya di Afrika selatan sebelum 1994, orang-orang berkulit putih memerintah secara oligarki atas mayoritas penduduk Afrika Selatan berkulit Hitam.²

3) Demokrasi

Demokrasi Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan Umum (pemilu) yang berlangsung secara jujur, bebas, dan adil. Dalam teori Ilmu Negara pengertian tentang teori bentuk Negara sejak dahulu kala dibagi menjadi dua yaitu: monarchie dan republik. Untuk menentukan suatu Negara itu berbentuk monarchie dan republik, dalam Ilmu Negara banyak macam ukuran yang dipakai, antara lain Jellinek dalam bukunya yang berjudul *Allgemene Staatslehre* memakai sebagai kriteria bagaimana caranya kehendak negara itu dinyatakan. Jika kehendak Negara itu ditentukan oleh satu orang saja, maka bentuk Negara itu monarchie dan jika kehendak Negara itu ditentukan oleh orang banyak yang merupakan suatu

² *Ibid.* h. 127

majelis, maka bentuk negaranya adalah republik. Contohnya seperti Indonesia dan Amerika Serikat.³

4) Aristokrasi

Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dipegang oleh kaum cendekiawan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan pikiran keadilan, contohnya Nigeria.⁴

5) Timokrasi

Timokrasi adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kejayaan dan kehormatan tertinggi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya pada tahun 1700-an, Prancis pernah menganut sistem Timokrasi.⁵

6) Tirani

Tirani adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dipegang oleh seorang tirani yang mempunyai hak pribadi dan bertindak sewenang-wenang sehingga jauh dari tujuan dan cita-cita keadilan. Contohnya Musholini dan Hitler Jerman, Stalin Rusia, dan Korea Utara.⁶

b. Sistem Pemerintahan

Secara sederhana Mahfud MD mengatakan bahwa sistem pemerintahan negara adalah cara bekerja dan berhubungan ketiga poros kekuatan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sehingga yang

³ A.Ubaidillah, *Demokrasi, Pancasila, Dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 143.

⁴ *Ibid.* 144.

⁵ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 62.

⁶ *Ibid.* h. 62.

dimaksud dengan sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara.⁷ Sedangkan Jimly Asshiddiqie mengartikan sistem pemerintahan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannya dengan legislatif.⁸

Menurut Sarundajang,⁹ sistem pemerintahan adalah sebutan populer dari bentuk pemerintahan. Hal ini didasari dari pemikiran bahwa bentuk negara adalah peninjauan secara sosiologis, sedangkan secara yuridis disebut bentuk pemerintahan, yaitu sistim yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara diatur oleh konstitusinya. Karena itu bentuk pemerintahan sering dan lebih populer disebut sebagai sistem pemerintahan. Lebih lanjut Sarundajang,¹⁰ menghubungkan sistem pemerintahan dengan konsep sistem, yaitu sebagai suatu susunan atau tatanan berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan satu sama lain secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan. Apabila salah satu bagian tersebut berfungsi melebihi wewenangnya atau kurang berfungsi, maka akan mempengaruhi komponen yang lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka pada hakikatnya kajian tentang sistem pemerintahan adalah kajian tentang bagaimana lembaga-lembaga

⁷ Moh. Mahfud MD, *Dasar-dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 75.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok dan Struktur Ketatanegaraan Indoneisa* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008), h. 311.

⁹ Sarundajang, *Babak Baru Sistim Pemerintahan* (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012), h. 33

¹⁰ *Ibid.* h.33

negara bekerja, dan apakah legislatif yang lebih tinggi ketimbang eksekutif atau sebaliknya eksekutif lebih tinggi dari pada parlemen. Selain itu juga bagaimana tingkat pengaruh kekuasaan dalam menentukan arah keputusan negara apakah legislatif atau eksekutif. Sistem pemerintahan juga mengkaji bagaimana pembentukan dan pertanggungjawaban kabinet/menteri apakah dibentuk oleh legislatif atau eksekutif. Apakah menteri bertanggung jawab kepada legislatif atau yudikatif. Kesemuanya itu adalah bagian dari hakikat kajian sistem pemerintahan.

1) Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, demikian juga parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan yaitu dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Dalam sistem parlementer, jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara dipisahkan. Pada umumnya, jabatan kepala negara dipegang oleh presiden, raja, ratu atau sebutan lain dan jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Inggris, Belanda, Malaysia dan Thailand merupakan negara-negara yang menggunakan sistem parlementer dengan bentuk kerajaan. Sedangkan Jerman merupakan negara republik yang menggunakan sistem parlementer dengan sebutan kanselir. Bahkan, di Jerman, India dan Singapura perdana menteri justru lebih penting dan lebih besar kekuasaannya

daripada presiden. Presiden India, Jerman dan Singapura hanya berfungsi sebagai simbol dalam urusan-urusan yang bersifat seremonial.¹¹

Ada beberapa karakteristik sistem pemerintahan parlementer di antaranya, *pertama*, peran kepala Negara hanya bersifat simbolis dan seremonial serta mempunyai pengaruh politik yang sangat terbatas, meskipun kepala negara tersebut mungkin saja seorang presiden, *kedua*, cabang kekuasaan eksekutif dipimpin seorang perdana menteri atau kanselir yang dibantu oleh kabinet yang dapat dipilih dan diberhentikan oleh parlemen, *ketiga*, parlemen dipilih melalui pemilu yang waktunya bervariasi, dimana ditentukan oleh kepala negara berdasarkan masukan dari perdana menteri atau kanselir.¹²

Melihat karakteristik tersebut, maka dalam sistem pemerintahan parlementer, posisi eksekutif dalam hal ini kabinet adalah lebih rendah dari parlemen. Oleh karena posisinya yang lemah tersebut, maka untuk mengimbangi kekuasaan, kabinet dapat meminta kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen dengan alasan parlemen dinilai tidak representatif. Jika itu yang terjadi, maka dalam waktu yang relatif singkat kabinet harus menyelenggarakan pemilu untuk membentuk parlemen baru.¹³

¹¹ Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 53.

¹² *Ibid.* h. 54

¹³ Moh. Mahfud M.D., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000), h. 74

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa dalam sistem parlementer terdapat beberapa pola. Dalam sistem parlementer dengan *parliamentary executive*, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif merupakan pencerminan. Kekuatan-kekuatan politik di badan legislatif yang mendukungnya. Kabinet ini dinamakan kabinet parlementer. Pada umumnya, ada keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif. Keseimbangan ini lebih mudah tercapai jika terdapat satu partai mayoritas maka dibentuk kabinet atas kekuatannya sendiri. Kalau tidak terdapat partai mayoritas, maka dibentuk kabinet koalisi yang berdasarkan kerja sama antara beberapa partai yang bersama-sama mencapai mayoritas di badan legislatif. Beberapa negara, seperti Belanda dan negara-negara Skandinavia pada umumnya berhasil mencapai suatu keseimbangan sekalipun tidak dapat dipungkiri adanya dualisme antar pemerintah dan badan-badan legislatif.¹⁴

Dalam hal terjadinya suatu krisis karena kabinet tidak lagi memperoleh dukungan dari mayoritas badan legislatif, dibentuk kabinet ekstra parlementer, yaitu kabinet yang dibentuk tanpa formatur kabinet, karena merasa terikat pada konstelasi kekuatan politik di badan legislatif. Dengan demikian, formatur kabinet memiliki peluang untuk menunjuk menteri berdasarkan keahlian yang

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 209.

diperlukan tanpa menghiraukan apakah dia mempunyai dukungan partai. Kalaupun ada menteri yang merupakan anggota partai, maka secara formil dia tidak mewakili partainya. Biasanya suatu kabinet ekstra parlementer mempunyai program kerja yang terbatas dan mengikat diri untuk mengganggu pemecahan masalah-masalah yang bersifat fundamental.¹⁵

Menurut Inu Syafiie,¹⁶ sistem parlementer digunakan untuk mengawasi eksekutif oleh legislatif, jadi kekuasaan parlemen lebih besar dari pada eksekutif. Dalam sistem ini Dewan Menteri (*kabinet*) bertanggungjawab kepada parlemen. Lebih lanjut diuraikan Syafiie,¹⁷ sistem menggambarkan keadaan dimana lembaga eksekutif bertanggungjawab kepada lembaga legislatif membuat lembaga eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif melalui mosi tidak percaya. Akan tetapi karena eksekutif (perdana menteri) memiliki kedudukan yang kuat karena berasal dari suara mayoritas parlemen, maka perdana menteri sulit untuk dijatuhkan.

Sistem parlementer mempunyai kriteria adanya hubungan antara legislatif dengan eksekutif, di mana satu dengan yang lain dapat saling mempengaruhi. Pengertian mempengaruhi di sini adalah bahwa salah satu pihak mempunyai kemampuan kekuasaan (*Power Capacity*) untuk menjatuhkan pihak lain dari jabatannya. Alan R. Ball dalam buku karangan Mariana, Paskalina, & Yuningsih, berjudul

¹⁵ *Ibid.* h, 210.

¹⁶ Inu Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h.88

¹⁷ *Ibid.* h.88

Perbandingan Pemerintahan,¹⁸ menamakan sistem pemerintahan parlementer ini dengan sebutan *the parliamentary types of government* dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Kepala negara hanya mempunyai kekuasaan nominal. Hal ini berarti bahwa kepala negara hanya merupakan lambang / simbol yang hanya mempunyai tugas-tugas yang bersifat formal, sehingga pengaruh politiknya terhadap kehidupan negara tidak begitu besar namun sangatlah kecil.
- b) Pemegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya adalah perdana menteri bersama kabinetnya yang dibentuk melalui lembaga legislatif, dengan demikian kabinet sebagai pemegang kekuasaan eksekutif harus bertanggung jawab kepada badan legislatif dan harus meletakkan jabatannya bila parlemen tidak mendukungnya.
- c) Badan legislatif dipilih untuk bermacam-macam periode yang saat pemilihannya ditetapkan oleh kepala negara atas saran dari perdana menteri.

2) Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem presidensiil merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Keberadaan sistem

¹⁸ Mariana, *Perbandingan Pemerintahan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), h.10

presidensiil dinilai Jimly Asshiddiqie ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah bahwa sistem presidensiil lebih menjamin stabilitas pemerintahan, sedangkan kekurangannya, sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaan cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem ini.¹⁹

Ada beberapa ciri dalam sistem pemerintahan presidensiil, di antaranya *pertama*, kepala Negara juga menjadi kepala pemerintahan, *kedua*, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, *ketiga*, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, *keempat*, posisi eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.²⁰ Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensiil dapat dikatakan sebagai subsistem pemerintahan republik, karena memang hanya dapat dijalankan dalam negara yang berbentuk republik. Ada beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensiil, yaitu:²¹

- a) Terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi.
- b) Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara,

¹⁹ Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju....*, h. 49

²⁰ Moh. Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia....*, h. 74.

²¹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta: FH-UII Press, 2003), h. 15-16.

- c) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu/bawahan yang bertanggung jawab kepadanya,
- d) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif begitupun sebaliknya.
- e) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan
- f) Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

Sementara Jimly Asshiddiqie berbeda dibandingkan dengan yang lainnya, mengemukakan sembilan karakteristik sistem pemerintahan presidensial yaitu:²²

- a) Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
- b) Presiden merupakan eksekutif tunggal.
- c) Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan.
- d) Presiden mengangkat menteri yang bertanggung jawab kepadanya.
- e) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif begitupun sebaliknya.
- f) Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen/legislatif.
- g) Jika dalam sistem parlemen berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip konstitusi.

²² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok dan Struktur Ketatanegaraan Indoneisa* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008), h. 316.

- h) Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.
- i) Kekuasaan tersebut secara tidak terpusat sebagaimana dalam sistem parlementer.

3) Sistem pemerintahan Campuran (*Quasi*)

Menurut Mahfud MD,²³ Sistem campuran atau *quasi* adalah sistem pemerintahan yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Dalam sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Dalam sistem pemerintahan ini, selain memiliki Presiden sebagai Kepala Negara, juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala Pemerintahan untuk memimpin kabinet yang bertanggungjawab kepada parlemen. Bila presiden tidak diberi posisi dominan dalam sistem pemerintahan ini, presiden tidak lebih dari sekedar lambang dalam pemerintahan. Akan tetapi presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen, bahkan presiden dapat membubarkan parlemen, sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini terbentuk dari sejarah perjalanan pemerintahan suatu negara.

Seperti halnya presidensial dan parlementer keuntungan dengan penggunaan istilah sistem pemerintahan campuran yaitu dapat menimbulkan kesan bahwa jenis sistem pemerintahan terakhir ini

²³ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 210), h. 153.

masih mempunyai hubungan yang erat dengan sistem pertama (parlementer) dan sistem kedua (presidensiil) yang kesemuanya itu berada dalam kerangka sistem politik demokrasi liberal atau demokrasi modern, menyebutkan bahwa berhubung sistem pemerintahan campuran ini sangat khas maka perlu ditentukan ciri-ciri utamanya, yaitu :²⁴

- a) Menteri-menteri dipilih oleh parlemen.
- b) Lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi.
- c) Menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden.

Lebih lanjut diuraikan oleh Mariana,²⁵ bahwa ciri yang *pertama* adalah merupakan ciri pokok dari sistem parlementer, sedangkan ciri yang *kedua* adalah merupakan ciri pokok dari sistem pemerintahan presidensiil. Ciri yang *ketiga* adalah ciri yang tidak terdapat baik dalam sistem pemerintahan parlementer maupun dalam sistem pemerintahan presidensiil. Justru ciri ketiga ini adalah merupakan konsekuensi dari dianutnya ciri pertama dan kedua secara bersama-sama.

4) Sistem Pemerintahan dengan Pengawasan Langsung Oleh Rakyat

Dalam sistem ini, parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat. Kontrol ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

²⁴ *Ibid.* h. 154.

²⁵ Mariana, *Perbandingan Pemerintahan....*, h. 32.

a) Referendum

Sistem referendum tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat di mana sebagai pelaksanaannya adalah dengan adanya kehendak rakyat melalui inisiatif publik merespon isu publik, yaitu hak publik untuk mengajukan/mengusulkan suatu rancangan peraturan perundang-undangan kepada legislatif dan eksekutif. Kelemahan sistem ini adalah proses yang dijalankan untuk menyelenggarakan agenda pemerintahan membutuhkan waktu yang relatif lama, hal tersebut disebabkan bahwa dalam setiap formulasi produk legislasi yang signifikan selalu melibatkan rakyat di dalamnya. Kelebihan sistem ini adalah bahwa setiap masalah-masalah pemerintahan yang sangat penting dan pemerintahan.²⁶

Referendum adalah suatu kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan keputusan setuju atau menolak terhadap kebijaksanaan yang ditempuh oleh parlemen atau setuju atau tidaknya terhadap kebijaksanaan yang dimintakan persetujuannya kepada rakyat. Ada tiga macam referendum yaitu,²⁷

Referendum obligator yaitu berlakunya undang-undang yang dibuat parlemen ialah setelah disetujui oleh rakyat melalui suara terbanyak. Referendum semacam ini dilakukan terhadap undang-undang yang menyangkut hak-hak rakyat. Referendum fakultatif yaitu suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen setelah

²⁶ *Ibid.* h. 35.

²⁷ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 63.

diumumkan, beberapa kelompok masyarakat yang berhak meminta disahkan melalui referendum. Ini biasanya dilakukan terhadap undang-undang biasa. Referendum consultatif yaitu referendum untuk soal-soal tertentu yang teknisnya rakyat tidak tahu.²⁸

2. Konsep Pemerintahan Menurut *Fiqh Siyasah*

a. Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

1) *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam al-Tirmidzi, seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, *fiqh* secara bahasa berarti mengetahui batinnya sampai kepada ke dalamannya.²⁹ Sedangkan, secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.³⁰

Suyuthi Pulungan mengemukakan definisi *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.

²⁸ *Ibid.* h. 64.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), h. 591.

³⁰ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta, Bulan: 2004), h. 26.

Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan *istiqomah*.³¹

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudharatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2) Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun

³¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002) h. 22-23.

perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).³²

Sementara menurut Muhammad Iqbal,³³ dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

a) Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) meliputi tentang:

(1) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau Legislatif.

(2) Peradilan (*qadha'iyyah*) atau yudikatif.

(3) Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.

b) Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang :

(1) Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.

(2) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 14.

³³ *Ibid.* h. 15-16.

(3) Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*)

c) Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).

3) *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*

Secara harfiah, *ahl al-hall wa al-aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahl al-hall wa al-aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.³⁴

Mengenai syarat sebagai *Ahl Al Hall Wa Al Aqd*, Farid Abdul Khalik menyebutkan bahwa wajib atas rakyat untuk memilih segolongan dari mereka, yaitu orang-orang yang khusus dari *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* yang mempunyai sifat-sifat yang harus ada pada mereka seperti berilmu yang dapat membantunya untuk memikirkan perkara-perkara umum dan urusan-urusan politik, berkemampuan untuk mengeluarkan keputusan dan undang-undang yang dapat mewujudkan kemaslahatan rakyat, juga berkemampuan untuk melakukan kewajiban pengawasan atas wewenang dewan eksekutif,

³⁴ *Ibid.*h. 158-159.

baik pemerintahan dan penguasa, demi mencegah kemungkaran yang mungkin akan dilakukannya sebagai pelanggaran terhadap hak-hak Allah, dan demi menjaga hak dan kebebasan. Juga seperti syarat, harus memiliki sifat adil dan memiliki syarat-syarat lainnya yang dituntut dalam jabatannya sebagai wakil rakyat.³⁵

4) *Wizarah*

Kata *wizarah* berasal dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama suatu kementrian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan public demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.³⁶

Ada dua macam *wazir*, yaitu *wazir tafwidl* dan *wazir tanfidz*. Para sarjana-sarjan muslim menyamakan *wazir tafwidl* dengan perdana menteri atau wakil presiden dan menyamakan *wazir tanfidz* dengan menteri-menteri lainnya. Sudah tentu hal tersebut tidaklah persis demikian, sebab sudah tentu konstelasi politik zaman dulu sangat jauh berbeda dengan sekarang, satu hal barangkali yang dapat ditarik dari konsep tentang *wazir* ini adalah kepala negara dapat mengangkat pembantu-pembantunya dan menyerahkan sebagian kekuasaan yang

³⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 90.

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam....*, h. 166

ada padanya kepada para pembantunya dengan tujuan agar tugas-tugas *imam* yang cukup berat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama.³⁷

b. Sejarah Pemerintahan Islam

Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, *khilafah* merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan *khilafah* adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhalifahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih.³⁸

Di dalam periode yang pertama, timbullah benih masyarakat Islam dan dalam periode inilah ditetapkan dasar-dasar Islam yang pokok. Dalam periode yang kedua, disempurnakan pembentukan masyarakat Islam serta dijelaskan sesuatu yang tadinya dikemukakan secara ringkas (global) dan

³⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 80.

³⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 204-205.

disempurnakan perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru, serta menerapkan prinsip-prinsip itu ke dalam kenyataan. Dalam periode inilah nampak masyarakat Islam dalam bentuk kemasyarakatan sebagai satu kesatuan yang bergerak menuju kepada satu tujuan.³⁹

Dari segi tinjauan politik, sejarah lebih memperhatikan periode yang kedua, karena jamaah Islamiyah pada waktu itu telah memperoleh kedaulatannya yang sempurna dan kemerdekaan yang penuh serta prinsip-prinsipnya mulai diterapkan ke dalam alam kenyataan. Dalam pada itu, kedua-dua periode ini dapat dikatakan dalam tinjauan sejarah, adalah masa pembentukan dasar dan membangun. Maka dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi nilainya. Karena dialah yang memberi jiwa kepada masa-masa yang datang sesudahnya. Dari segi *tafkir nazhary*, maka masa ini membentuk daya gerak yang menghasilkan teladan-teladan yang sempurna yang menjadi tumpuan pikiran para ahli, dan membentuk pula titik perjumpaan bermacam aliran. Walaupun satu sama lainnya menempuh jalan sendiri-sendiri.⁴⁰

Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi. Pada periode Mekkah pengikut beliau yang jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan

³⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam & Politik Bernegara* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 3.

⁴⁰ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 2002), h. 89.

berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas, sehingga tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial penekan terhadap kelompok sosial mayoritas kota itu yang berada di bawah kekuasaan aristokrat Quraisy, yang masyarakatnya homogen. Tapi setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar, Di kota itu, "mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan yang akhirnya merupakan suatu negara. Suatu negara yang daerah kekuasaannya di akhir zaman nabi meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Dengan kata lain di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul, tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara.⁴¹

Praktek pemerintahan yang dilakukan Muhammad SAW sebagai Kepala Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.⁴²

Adapun pranata sosial di bidang ekonomi yang juga menjadi bagian dari tugas kenegaraan, adalah usaha Nabi Muhammad SAW mewujudkan

⁴¹ *Ibid.* h. 90.

⁴² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran....*, h. 97.

keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat Madinah. Untuk tujuan ini beliau mengelola zakat, infaq dan sadaqah yang berasal dari kaum muslimin, *ghanimah* yaitu harta rampasan perang dan *jizyah* (pajak) yang berasal dari warga negara non-muslim. *Jizyah* oleh kalangan juris muslim disebut juga "pajak perlindungan" (*protection tax*). Sedangkan praktek pemerintahan Nabi Muhammad di bidang hukum adalah kedudukan beliau sebagai *hakam* untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di kalangan masyarakat Madinah, dan menetapkan hukuman terhadap pelanggar perjanjian. Ketika kaum Yahudi melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali terhadap isi Piagam Madinah, dua kali beliau bertindak sebagai hakamnya dan sekali beliau wakikan kepada sahabat untuk melaksanakannya. Kedudukannya sebagai *hakam* dan tugas ini pernah beliau wakikan kepada sahabat, dan penunjukan Muaz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib sebagai hakim, merupakan bukti praktek pemerintahan Nabi di bidang pranata sosial hukum.⁴³

Dari sebagian contoh praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Muhammad SAW tersebut, tampak bahwa beliau dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara dalam memerintah Negara Madinah dapat dikatakan amat demokratis. Sekalipun undang-undangnya berdasarkan wahyu Allah yang beliau terima, dan Sunnah beliau termasuk Piagam Madinah. Beliau tidak bertindak otoriter sekalipun itu sangat mungkin

⁴³ *Ibid.* h. 98

beliau lakukan dan akan dipatuhi oleh umat Islam mengingat statusnya sebagai Rasul Allah yang wajib ditaati.⁴⁴

Berdasarkan ijma' sahabat, wajib hukumnya mendirikan kekhalifahan. Setelah Rasulullah wafat, mereka bersepakat untuk mendirikan kekhalifahan bagi Abu Bakar, kemudian Umar, Usman, dan Ali, sesudah masing-masing dari ketiganya wafat. Para sahabat telah bersepakat sepanjang hidup mereka atas kewajiban mendirikan kekhalifahan, meski mereka berbeda pendapat tentang orang yang akan dipilih sebagai khalifah, tetap mereka tidak berbeda pendapat secara mutlak mengenai berdirinya kekhalifahan. Oleh karena itu, kekhalifahan (*khilafah*) adalah penegak agama dan sebagai pengatur soal-soal duniawi dipandang dari segi agama.⁴⁵

Jabatan ini merupakan pengganti Nabi Muhammad Saw, dengan tugas yang sama, yakni mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia. Lembaga ini disebut *khilafah* (kekhalifahan). Orang yang menjalankan tugas itu disebut *khalifah*. Tentang penamaan *khalifah* Allah masih sering muncul pertentangan. Sebagian orang membolehkannya, berdasarkan kekhalifahan universal yang diperuntukkan seluruh anak Adam. Lagi pula, Abu Bakar menolak ketika beliau dipanggil dengan nama tersebut. "Saya bukan khalifah Allah, tapi khalifah Rasulullah".⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.* h. 98-99.

⁴⁵ Sali Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam* (Bandung; Mizan, 2003).
205.

⁴⁶ *Ibid.* h. 206.

Masalah kepemimpinan merupakan salah satu urusan utama dalam sistem masyarakat Islam, hal ini terbukti pada peristiwa pembai'atan Abu Bakar r.a segera setelah wafatnya Rosululah S.A.W, oleh para sahabat senior baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar di balai pertemuan Saqifah Bani Saidah.⁴⁷

Karena Nabi Muhammad S.A.W tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimim sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshar, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhawah Islamiah yang tinggi, akhirnya, Abu Bakar terpilih. Rupanya, semangat keagamaan Abu Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiatnya.⁴⁸

Pemilihan khalifah oleh para wakil dari masing-masing golongan inilah yang kemudian menjadi landasan para ulama untuk merumuskan istilah *Ahl Al Hall Wa Al Aqd*, yaitu sebutan bagi orang-orang yang

⁴⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran...*, h. 102.

⁴⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 35.

bertindak sebagai wakil ummat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Menurut Abdul Karim Zaidan, tugasnya antara lain memilih khalifah, Imam atau pemimpin negara secara langsung.⁴⁹

Dari peristiwa pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah, menurut H.A Djazuli dapat ditarik sebuah kesimpulan di antaranya :

- 1) Khalifah dipilih dengan cara musyawarah di antara para tokoh dan wakil umat.
- 2) Yang mengangkat itu para wakil umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada waktu itu.
- 3) Di dalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari alternatif yang terbaik di dalam menentukan siapakah calon khalifah yang paling memenuhi persyaratan.
- 4) Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan, dengan tidak menggunakan voting.⁵⁰

Dalam pengangkatan Khalifah Utsman pun menggunakan konsep *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* yaitu melalui badan Syura yang dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya. Khalifah Umar membentuk sebuah komisi yang terdiri dari enam orang calon dengan perintah memilih salah seorang calon dari mereka untuk diangkat menjadi khalifah baru. Mereka ialah, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Tholib, Thalhah, Zubair bin

⁴⁹ Frenki, *Nilai-nilai Ketatanegaraan Islam dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia*, (Bandar Lampung: LP2M, 2015), h. 2.

⁵⁰ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*...,h. 75.

Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdullah ditambahkan kepada komisi enam itu, tetapi ia hanya mempunyai hak pilih, dan tidak berhak dipilih. Melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali, sidang Syura akhirnya memberi mandat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan.⁵¹

Bila Al-Qur'an dan As-Sunah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahl al-hall wa al-aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada di dalam *turats* fiqh kita di bidang politik keagamaan dari pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Al-Qur'an ada dalam mereka yang disebut dengan "*ulil amri*".⁵²

Ajaran Al-Qur'an yang berkaitan dengan pemerintahan dilaksanakan oleh Rasulullah dalam praktek amaliyahnya. Beliau telah memilih masyarakat Islam yaitu masyarakat yang lahir dengan munculnya Islam sebagai bentuk negara yang bertumpu atas dasar ajaran-ajaran politis ini. Adapun ciri khas yang membedakan sistem negara ini dengan yang lainnya adalah :⁵³

1) Kekuasaan perundang-undangan Ilahi

Dasar yang amat utama dalam negara ini ialah *al-Hakimiyah* (kekuasaan legislatif dan kekuasaan hukum tertinggi ada ditangan Allah SWT). Bahwa pemerintahan kaum muslimin pada hakikatnya

⁵¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*...., h. 37..

⁵² Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*...., h.82.

⁵³ Abul A'la Al Maududi, *Sistem Politik Islam*, terjemahan Muhammad al-Baqir (Bandung; Mizan, 2000), h. 95.

adalah perwakilan, sehingga pemerintahan tidak terlepas dari ajaran Islam dan Al Qur'an maupun As Sunnah.

2) Keadilan antara manusia

Seluruh rakyat memiliki persamaan hak di hadapan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan ke atas mereka semua, sebab dalam Islam tidak dibenarkan adanya sistem koneksi atau kesukuan.

3) Persamaan antara kaum muslimin.

Ajaran Al Qur'an dalam surat Al-Hujarat ayat 10 dan 13 berlaku dalam tuntutan kehidupan bernegara. Perbedaan ras dan golongan tidak mengakibatkan dibedakannya hak pilih rakyat atau prioritas atas hak dan kedudukan.

4) Tanggung jawab pemerintahan

Pemerintahan, kekayaan serta kekuasaan adalah rahmat Allah, oleh karenanya pertanggung-jawabannya harus diserahkan kepada kaum muslimin yang takut kepada Allah dan benar-benar beriman.

5) Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.

Dasar kelima dari negara Islam adalah keharusan bagi para pemimpin negara dan pejabat-pejabat untuk bermusyawarah dengan kaum muslimin dan mencari keridhaan mereka, mengikuti pendapat mereka serta melaksanakan sistem pemerintahan dengan cara bermusyawarah.

6) Ketaatan dalam hal kebijakan

Makna dasar dari kaedah ini adalah bahwa perintah yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan atau penguasa kepada rakyat harus ditaati, apabila tidak sesuai dengan undang-undang syariat, maka haram bagi rakyat untuk mentaatinya.

Sementara asas fundamental yang harus ditegakkan umat dalam membangun suatu negara Islam ada tiga, yaitu :⁵⁴

1) *Al-Adalah*

Keadilan yang seluas-luasnya menyangkut aspek hukum, sosial dan ekonomi juga *equality of opportunity*.

2) *Syura* (Musyawarah)

Menjamin negara dan masyarakat agar tidak hanyut ke arah kultus individu dan sistem pemerintahan Fir'aun. Dalam Al-Qur'an kita jumpai lebih dari 70 ayat yang menyangkut Fir'aun dan kehidupannya. Islam menunjukkan institusi penting untuk melawan setiap rezim yang zalim dengan musyawarah.

3) *Al-Ikwanul Muslimin*.

Maka dalam Islam tidak dikenal diskriminasi dan *segresi* (pengelompokan), serta perbedaan jenis kelamin. Persaudaraan Islam ini tidak hanya berdasarkan persamaan agama tapi juga persaudaraan di antara sesama manusia.

⁵⁴ Sali Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam.....*, h. 32

Lebih lanjut, yang perlu diingat adalah tujuan suatu negara di dalam ajaran Islam sudah jelas jika mau meneliti Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Abdul A'la Al-Maududi menerangkan beberapa tujuan diselenggarakannya negara, antara lain :⁵⁵

- 1) Untuk mengelakkan terjadinya eksploitasi antara manusia, antar kelompok dan kelas-kelas dalam masyarakat.
- 2) Memelihara kebebasan ekonomi, politik, pendidikan dan agama para warga negara dan melindungi seluruh warga negara dari invasi asing.
- 3) Untuk menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an.
- 4) Memberantas setiap kejahatan dan mendorong setiap kebajikan yang dengan tegas telah digariskan dalam Al Qur'an.
- 5) Menjadikan negara sebagai tempat tinggal yang teduh dan mengayomi setiap warga negara dengan jalan memberlakukan hukum tanpa diskriminasi (perbedaan segala aspek).

c. Sistem Pemerintahan Menurut Aliran Politik

1) Pemikiran Politik Sunni

Di kalangan pemikir Sunni terdapat pandangan bahwa pembentukan negara merupakan kewajiban. Namun demikian, para pemikir Sunni berbeda pendapat tentang dasar kewajiban ini. Menurut al-Mawardi, *imamah* (negara) dibentuk dalam rangka menggantikan posisi kenabian (*nubuwah*) dalam rangka melindungi agama dan

⁵⁵ Abul A'la Al Maududi, *Sistem Politik Islam*...., h. 234.

mengatur kehidupan dunia (*al-Imamah maudhu'atun li khilafatun al-nubuwwah fi hirasat al-din wa siyasat al-dunya*).⁵⁶

Hukum pelebagaan *imamah* (kepemimpin, negara), menurut al-Mawardi adalah *fardhu kifayah* berdasarkan *ijma'* ulama. Pandangan ini didasarkan pada realitas sejarah *al-khulafa' al-Rasyidin* dan para khalifah sesudah mereka, baik Bani Umaiyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam ketika itu. Pandangan al-Mawardi ini juga sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* yaitu *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna terpenuhi kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat tersebut juga wajib dipenuhi). Artinya menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah kewajiban umat Islam, sedangkan sarana atau alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara, maka mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*). Hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr bi syay' amr bi wasailihi* (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah mengerjakan penghubung-penghubungnya). Negara adalah penghubung atau alat untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁵⁷

Menurut beliau, khalifah sebagai Amirul Mukminin yang punya tugas ganda yakni mengatur kehidupan duniawi di samping mengelola masalah agama. Dalam hal ini beliau mengutamakan musyawarah, untuk menghindari terjadinya kekuasaan absolut pada seorang

⁵⁶ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014). h. 5.

⁵⁷ *Ibid.* h. 6.

penguasa. Juga menekankan diutamakannya maslahat atau kepentingan umat. Untuk bisa melaksanakan tugas ini maka seorang khalifah harus punya kemampuan berijtihad, di samping kemauan untuk berjihad, ia juga menyetujui bahwa khalifah haruslah keturunan Quraisy.⁵⁸

2) Pemikiran Politik Syi'ah

Kaum Syi'ah berpendapat bahwa jabatan kepala negara bukanlah hak tiap orang Islam, bahkan tidak pula menjadi hak tiap orang Quraisy, sebagaimana disebutkan oleh sebagian besar Ahlus Sunnah. Dalam pandangan Syi'ah Imamiyah, jabatan kepala negara adalah hak monopoli Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Perlu ditegaskan bahwa nama yang dipakai golongan Syi'ah untuk kepala negara adalah Imam.⁵⁹

Sesuai dengan paham yang dibawa oleh Muawiyah, Imamah dalam teori Syi'ah mempunyai bentuk kerajaan dan turun-temurun dari Bapak ke anak, seterusnya ke cucu dan demikian selanjutnya. Semestinya yang menggantikan Nabi Muhammad sebagai kepala negara dalam pandangan Islam Syi'ah adalah anak beliau. Tetapi karena beliau tidak mempunyai anak laki-laki yang hidup, maka jabatan itupun seharusnya jatuh ke tangan keluarga beliau yang terdekat.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.* h. 6-7

⁵⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya....*, h. 97

⁶⁰ *Ibid.* h. 98

Dalam masalah sifat imam, sekte Zaidiyah berpendapat bahwa imam tidak bersifat *ma'shum* (terbebas dari dosa dan kesalahan). Imam, seperti halnya manusia lainnya, mungkin saja berbuat salah dan dosa. Sedangkan sekte Isma'illiyah dan Imamiyah menganggap imam haruslah *ma'shum*. Hanya saja, kedua sekte ini berbeda dalam memahami pengertian *ma'shum*. Menurut Isma'iliyah, imam bersifat *ma'shum* dalam arti bahwa semua perbuatannya tidak mungkin salah. Kalau menurut penilaian orang awam imam berbuat suatu dosa atau kesalahan, bagi imam hal itu bukanlah dosa, dalam pandangan mereka, Nabi Muhammad SAW, menyampaikan wahyu dan syariat ada yang tersurat dan ada pula yang tersirat. Makna yang tersurat disampaikan kepada Nabi kepada umat Islam secara umum. Namun makna tersirat tidak disampaikan kecuali kepada orang-orang yang khusus, yaitu imam 'Ali bin Abi Thalib dan secara turun temurun kepada imam-imam lainnya. Karena itu, imam dalam pandangan mereka adalah orang-orang yang mengetahui makna lahir dan batin ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadits), sebagaimana yang diajarkan Nabi.⁶¹

3) Pemikiran Politik Khawarij

Berbeda dengan kelompok Sunni dan Syi'ah, mereka tidak mengakui hak-hak istimewa orang atau kelompok tertentu untuk menduduki jabatan khalifah. Jabatan tersebut bukanlah monopoli

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*...., h. 139.

mutlak suku Quraisy sebagaimana pandangan Sunni, bukan hak khusus Ali dan keluarganya sebagaimana klaim kelompok Syi'ah. Menurut mereka, siapa saja berhak menduduki jabatan khalifah, kalau memang mampu. Bahkan mereka mengutamakan orang non-Arab sebagai khalifah, supaya mereka bisa menjatuhkannya atau membunuhnya kalau ternyata tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan kebenaran. Khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Karena itu kelompok Khawarij tidak mempertimbangkan *'ashabiyah* atau keluarga untuk mengangkat pemimpin mereka.⁶²

Dari pemikiran ini, pengikut Khawarij berpendapat bahwa kekhilafahan bukanlah kewajiban yang berdasarkan *Syar'i* (agama), sebagaimana pandangan al-Ghazali dan al-Mawardi serta Syi'ah. Pengangkatan khalifah dan pembentukan negara adalah masalah kemaslahatan manusia saja. Kalau pertimbangan akal lebih maslahat mengangkat khalifah dan membentuk negara, maka hal tersebut boleh dilakukan. Tetapi bila ternyata tanpa kepemimpinan mereka dapat menjalankan agama dan mencapai kemaslahatan, maka lembaga khalifah tidak perlu dibentuk. Berbeda dengan Sunni dan syi'ah, mereka tidak menganggap kepala negara sebagai orang yang sempurna. Ia adalah manusia biasa juga yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karenanya, mereka menggunakan mekanisme

⁶² *Ibid.* h.140-141

syura untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kalau ternyata kepala negara menyimpang dari semestinya, dia dapat diberhentikan atau dibunuh.⁶³

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang memuat uraian secara sistematis tentang hasil penulisan terdahulu (*preliminary research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi.

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

1. Muhamad Pajang dari UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, Jurusan Filsafat Agama, dengan judul skripsi “*Pandangan Hasan al-Banna tentang Demokrasi*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Demokrasi yang pertama menurut Hasan al-Banna adalah demokrasi pemerintahan yang konstitusional yaitu sistem pemerintahan yang paling dekat dengan Islam, Ikhwan tidak akan memilih dengan cara selain yang sesuai dengan cara Islam yang berupa pilar-pilar pemerintahannya sebagai berikut: *pertama*, tanggung jawab pemerintah, dalam arti bahwa ia bertanggungjawab kepada Allah dan rakyatnya. Pemerintahan, tidak lain

⁶³ *Ibid.* h. 141.

adalah praktek kontrak kerja antara rakyat dengan pemerintah, untuk memelihara kepentingan bersama. *Kedua*, kesatuan umat. Artinya, ia memiliki sistem yang satu, yaitu Islam. Dalam arti, ia harus melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dan nasihat. *Ketiga*, menghormati aspirasi rakyat. Artinya, diantara hak rakyat adalah mengawasi para penguasa dengan pengawasan yang seketat-ketatnya, selain memberi masukan tentang berbagai hal yang dipandang baik untuk mereka. Pemerintah harus mengajak mereka bermusyawarah, menghormati aspirasi mereka, dan memperhatikan hasil musyawarah.⁶⁴

2. Yarsori, dari UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, Jurusan Aqidah Filsafat dengan judul skripsi "*Konsep Kepemimpinan Hasan al-Banna*". Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Konsep Kepemimpinan yang dibangun Hasan al-Banna merupakan prinsip kebenaran dan yang lainnya adalah prinsip kebatilan. Kepemimpinan yang diciptakan al-Banna adalah sehat jasmani dan ruhani, adil, sholeh, jujur, cerdas serta mempunyai kapabilitas untuk memimpin. Kepemimpinannya adalah menggunakan sistem kelembagaan dalam metode dakwah organisasi keagamaannya yang didirikan dengan sebutan (Ikhwanul Muslimin) bertujuan untuk mengembalikan ajaran-ajaran serta hukum-hukum Islam dalam kehidupan yang berdasarkan al-Quran dan Hadis sebagai salah satu spirit dan jatuhnya umat Islam dari

⁶⁴ Muhamad Pajang, *Pandangan Hasan al-Banna tentang Demokrasi* (Skripsi Fakultas Ushuludin, UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, 2015), h. 83.

agama. Istiqomah sebagai landasan dalam perjuangan walaupun nyawa taruhannya, sehingga lahir ruh jihad yang membara untuk membina ummat Islam dengan keikhlasannya.⁶⁵

3. Sodri Jaya, dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan judul skripsi “*Pembinaan Akhlak Perspektif Hasan al-Banna*”. Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam melaksanakan pembinaan akhlak, Hasan Al-Banna menggunakan program *usrah*. Program *usrah* ini menekankan perlunya unsur-unsur yang dapat membimbing para anggota *usrah* mencapai puncak keteladanan, mengokohkan ikatan hatinya, dan mengangkat derajat ukhuwahnya, dari kata-kata dan teori menuju realitadan amal nyata. Program *usrah* ini mempunyai 3 rukun yaitu *ta'aruf* (saling mengenal), *tafahum* (saling memahami), dan *takaful* (saling menanggung beban). Didalam program *usrah* tersebut mempunyai pilar-pilar atau penopang-penopang fundamental yang menjadi pijakan program yang terbagi menjadi 4 unsur yaitu unsure *tauji*h (pengarahan), unsur *tarbiyah* (pembinaan), unsur *tadrib* (pelatihan) dan unsur *taqwim wal mutaba'ah* (evaluasi dan kontrol). Adapun unsur *tarbiyah* terbagi menjadi dua yaitu unsur *tarbiyah* berwawasan konsepsional dan berwawasan operasional.⁶⁶

⁶⁵ Yarsori, *Konsep Kepemimpinan Hasan al-Banna* (Skripsi Fakultas Ushuludin, UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, 2010), h. 97

⁶⁶ Sodri Jaya, *Pembinaan Akhlak Perspektif Hasan al-Banna* (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan, Lampung, 2018), h. 84

Maka dengan demikian dari beberapa skripsi di atas, terdapat perbedaan dengan skripsi yang sedang saya bahas. Skripsi yang saya teliti yaitu membahas tentang konsep pemerintahan Islam menurut Hasan al-Banna, serta analisis *fiqh siyasah* terhadap konsep pemerintahan Islam menurut Hasan al-Banna.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaidillah, *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani* Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- A. Ubaidillah, *Demokrasi, Pancasila, Dan Pencegahan Korupsi* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Abbas As- Sisiy, *Biografi Dakwah Hasan Al Banna*, terjemahan, Nandang Burhanudin Bandung: Harokatuna Publishing, 2006.
- Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdulkadir Muhammad. 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kholik dkk, *Pemikiran Pendidikan Islam* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Abul A'la Al Maududi, *Sistem Politik Islam*, terjemahan Muhammad al-Baqir Bandung: Mizan, 2000.
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* Jakarta, Bulan Bintang: 2003.
- Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* Yogyakarta: FH-UII Press, 2003.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Farid Numan, *Ikhwanul Muslimin Anugrah Allah yang Terzhalimi* Depok: Pustaka Nauka, 2004.

- Frenki, *Nilai-nilai Ketatanegaraan Islam dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia*, Bandar Lampung: LP2M, 2015.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* Jakarta: UI Press, 2002.
- Hasan al-Banna, *Konsep Pembaruan Masyarakat Islam*, terjemahan Su'adi Sa'ad, Jakarta: Media Dakwah, 2001.
- Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid 1*, terjemahan, Anis Matta Solo: PT. Era Adicita Intermedia, 2018.
- Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid 2*, terjemahan, Anis Matta (Solo: PT. Era Adicita Intermedia, 2018.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam & Politik Bernegara* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Hery Muhammad dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh abad 20* Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Mariana, *Perbandingan Pemerintahan* Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia, 2003.
- Moh. Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* Jakarta: Rieneka Cipta, 2000.
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqh Politik Hasan al-Banna*, Terj. Odie al Faeda, Solo: Media Insani, 2003.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008.
- Musthafa Muhammad Thahan, *Pemikiran Moderat Hasan Al-Banna* Bandung: Harakatuna Publishing, 2007.